

TESIS

IMPLIKASI HUKUM SAAT BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA TERHADAP KEKHUSUSAN TINDAK
PIDANA KORUPSI



Diajukan Oleh :

MUHAMMAD ELDY

NIM 2220215310003

PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN

Juni 2024

**IMPLIKASI HUKUM SAAT BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA TERHADAP KEKHUSUSAN TINDAK
PIDANA KORUPSI**

Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh :

MUHAMMAD ELDY

NIM 2220215310003

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

Juni 2024

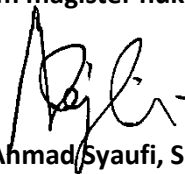
**TESIS INI
TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI UNTUK DIUJI
PADA TANGGAL.....**

PEMBIMBING



**Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.
NIP. 19810517 200501 1 001**


**Disahkan Oleh
Koordinator
Program magister hukum**



**Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

**Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**




**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

JUDUL TESIS : IMPLIKASI HUKUM SAAT BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
TERHADAP KEKHUSUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI

NAMA : MUHAMMAD ELDY
NIM : 2220215310003

Disetujui,
Pembimbing



Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.
NIP. 19810517 200501 1 001

Diketahui,



Kordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

RINGKASAN

ELDY, MUHAMMAD. 2024 IMPLIKASI HUKUM SAAT BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP KEKHUSUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: Prof. Dr. SUPRAPTO, S.H., M.H 100 halaman.

Pemberlakuan KUHP Baru berhubungan langsung dengan UU Tindak Pidana Korupsi (tipikor) tahun 1999 yang diubah tahun 2001, salah satunya ditinggalkannya asas *lex specialis derogat legi generalis* dengan dimasukkannya ke dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rekodifikasi KUHP. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pembahasan Tindak Pidana Korupsi terdapat dalam BAB XXXV Tindak Pidana Khusus, bagian ketiga tentang Tindak Pidana Korupsi dari Pasal 603 sampai Pasal 606. Berdasarkan hal di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait Implikasi hukum terkait kekhususan Tindak Pidana Korupsi Setelah Berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk menganalisis berkenaan dengan Kekhususan Tindak Pidana Korupsi Pada Saat Berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan menganalisis Konsekuensi Yuridis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada saat berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam hal ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, Sifat Penelitian, yaitu Preskriptif, Tipe Penelitian, yaitu keaburan norma, Pendekatan Penelitian, yaitu *statue approach, conceptual approach*.. Oleh karena itu perlu dilakukan telaah kepustakaan dengan berpedoman kepada literatur, baik berupa buku-buku, jurnal hukum, maupun peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Urgensi perlindungan hukum terhadap identitas anak yang menjadi Berdasarkan penelitian di atas, walaupun terdapat beberapa pertentangan pemikiran para ahli tentang kekhususan tindak pidana korupsi setelah di masukan dalam kodifikasi KUHP 2023, penulis berpendapat tindak pidana korupsi tetap merupakan tindak pidana khusus, karena Tujuan dimasukkannya pasal-pasal mengenai korupsi di KUHP 2023 adalah

untuk menyusun kodifikasi hukum pidana nasional, yang dilakukan dengan menyatukan perkembangan tindak pidana yang berada di luar KUHP, sehingga hukum pidana nasional menjadi terintegrasi. proses kodifikasi tersebut tidak menghilangkan sifat khusus dalam penanganan kasus korupsi yang di kodefikasi di bab “tindak pidana khusus, Dengan pengaturan "Bab Tindak Pidana Khusus" tersebut, pengaturan sesuai dengan masing-masing Undang-Undang Tindak Pidana Khusus tersebut sebagaimana Pasal 612 KUHP Tahun 2023, menyatakan ketentuan mengenai Tindak Pidana korupsi, berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut

2. Konsekuensi yuridis terhadap penegakan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 602 KUHP 2023 pengakan hokum tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang tindak pidana korupsi, sehingga peran penegak hokum dari kepolisian, kejaksaan dan KPK tetap berwenang dalam penanganan kasus korupsi

ELDY, MUHAMMAD. 2024 IMPLIKASI HUKUM SAAT BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP KEKHUSUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: Prof. Dr. SUPRAPTO, S.H., M.H 100 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci: implikasi hukum; berlakunya KUHP 2023; Kekhususan TIPIKOR

Penelitian Tesis ini bertujuan untuk menganalisis berkenaan dengan Kekhususan Tindak Pidana Korupsi Pada Saat Berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan menganalisis Konsekuensi Yuridis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada saat berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, Sifat Penelitian, yaitu Preskriptif, Tipe Penelitian, yaitu kecabangan norma, Pendekatan Penelitian, yaitu *statue approach*...

Dari hasil penelitian ini ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Urgensi perlindungan hukum terhadap identitas anak yang menjadi Berdasarkan penelitian di atas, walaupun terdapat beberapa pertentangan pemikiran para ahli tentang kekhususan tindak pidana korupsi setelah di masukan dalam kodifikasi KUHP 2023, penulis berpendapat tindak pidana korupsi tetap merupakan tindak pidana khusus, karena Tujuan dimasukkannya pasal-pasal mengenai korupsi di KUHP 2023 adalah untuk menyusun kodifikasi hukum pidana nasional, yang dilakukan dengan menyatukan perkembangan tindak pidana yang berada di luar KUHP, sehingga hukum pidana nasional menjadi terintegrasi. proses kodifikasi tersebut tidak menghilangkan sifat khusus dalam penanganan kasus korupsi yang di kodifikasi di bab "tindak pidana khusus, Dengan pengaturan "Bab Tindak Pidana Khusus" tersebut, pengaturan sesuai dengan masing-masing Undang-Undang Tindak Pidana Khusus tersebut sebagaimana Pasal 612 KUHP Tahun 2023, menyatakan ketentuan mengenai Tindak Pidana korupsi, berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut. **Kedua**, Konsekuensi yuridis terhadap penegakan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 602 KUHP 2023 pengakan hokum tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang tindak pidana korupsi, sehingga peran penegak hokum dari kepolisian, kejaksaan dan KPK tetap berwenang dalam penanganan kasus korupsi

ELDY, MUHAMMAD. 2024 LEGAL IMPLICATIONS DURING THE EFFECT OF LAW NUMBER 1 OF 2023 CONCERNING THE CRIMINAL LAW BOOK REGARDING THE SPECIFICITY OF CRIMINAL ACTIONS OF CORRUPTION. Master of Law Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Main Supervisor: Prof. Dr. SUPRAPTO, S.H., M.H 100 page

ABSTRACT

Keywords: *legal implications; enactment of the 2023 Criminal Code; Specificity of TIPIKOR*

This thesis research aims to analyze the specifics of corruption crimes at the time of the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code and to analyze the Juridical Consequences of Eradicating Corruption Crimes at the time of the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. . This research uses a type of normative legal research, Nature of Research, namely Prescriptive, Type of Research, namely vagueness of norms, Research Approach, namely statue approach...

*From the results of this research, it shows that: **First**, the urgency of legal protection for children's identities. Based on the research above, although there are several conflicting views of experts regarding the specifics of criminal acts of corruption after being included in the 2023 Criminal Code codification, the author is of the opinion that criminal acts of corruption remain special criminal acts, because the aim of including articles regarding corruption in the 2023 Criminal Code is to develop a codification of national criminal law, which is carried out by unifying developments in criminal acts that are outside the Criminal Code, so that national criminal law becomes integrated. The codification process does not eliminate the special nature of handling corruption cases which are codified in the "special criminal acts" chapter. With the "Special Crimes Chapter" regulations, the regulations are in accordance with each of the Special Crimes Laws as Article 612 of the 2023 Criminal Code , states that the provisions regarding criminal acts of corruption apply in accordance with the provisions of the Law. **Second**, the juridical consequences of enforcing criminal acts of corruption based on Article 602 of the 2023 Criminal Code are legal enforcement of criminal acts of corruption based on the Corruption Crime Law, so that the law enforcement role of the police, prosecutor's office and Corruption Eradication Commission remains authorized in handling corruption cases*

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur, hormat serta kemuliaan hanya bagi Allah SWT atas segala kasih, rahmat, karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan Judul **IMPLIKASI HUKUM SAAT BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP KEKHUSUSAN TINDAK PIDANA KORUPS.**

Penulisan Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Di dalam penyelesaian tesis ini penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan Tesis ini. Dalam kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian studi penulis, yaitu kepada:

1. Yang Sangat Terpelajar Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, SH., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
2. Yang Terpelajar Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, SH., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas

Lambung Mangkurat dan selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;

3. Yang Terpelajar Bapak Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H. selaku Pembimbing Penulisan Tesis saya yang dengan kesabarannya serta di sela-sela kesibukan selalu berkesempatan untuk meluangkan waktu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Tesis ini
4. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas ilmu yang diberikan sehingga penulis mendapatkan pengetahuan yang lebih serta memberikan pelayanan yang baik hingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan studi;
5. Rekan-rekan satu angkatan 2022 atas kebersamaan dan keceriaan yang akan selalu dikenang dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari kekurangan dan kelemahan dari tesis ini. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca terutama bagi yang ingin melanjutkan maupun mengembangkan tesis ini.

Hormat Penulis

Muhammad Eldy

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN TESIS	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	4
D. Tinjauan Pustaka	5
E. Metode Penelitian	41
F. Sistematika Penulisan.....	45
G. Rancangan Susunan BAB	45
BAB II KEKHUSUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA SAAT BERLAKUNYA UU NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.....	47
A. Karakteristik Tindak Pidana Khusus.....	47
B. Tindak Pidana Korupsi Sebagai Tindak Pidana Khusus	58
C. Kekhususan Tindak Pidana Korupsi Pada Saat Berlakunya Kuhp Baru	68
BAB III KONSEKUWENSI YURIDIS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA SAAT BERLAKUNYA UU NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.....	77

A. Tindak Pidana Korupsi Sebagai <i>Extra Ordinary Crime</i>	77
B. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Pada Kuhp Tahun 2023	89
C. Konsekwensi Yuridis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Saat Berlakunya Kuhp Tahun 2023	86
 BAB IV PENUTUP	 99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran	100